



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KEHUTANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD NENG
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 652409

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.011.150.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 214 m2/214 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 736 m2 di KAB / KOTA BANGGAI, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. Tanah Seluas 916 m2 di KAB / KOTA BANGGAI, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
5. Tanah Seluas 3 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 87.750.000
6. Tanah Seluas 1 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 28.400.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 505.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 M/T MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO URBANIK Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 252.591.279



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----
Rp. 1.768.741.279

III. HUTANG

Rp. ----
Rp. 1.768.741.279

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.